

Diskusi Mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Petugas Badan Ad Hoc pada Pemilu 2024

¹Posma Sariguna Johnson Kennedy, ²Rutman Lumbantoruan,
³Naomi Junita Batubara, ⁴Merryopita Natalia, ⁵Muhamad Rifai
^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

E-mail: ¹posmahutasoit@gmail.com, ²rutman.toruan@gmail,
³comnaomijunita523@gmail.com, ⁴nataliameriy2512@gmail.com,
⁵rifaimuhamadipay@gmail.com

ABSTRAK

Diskusi mengenai manajemen sumber daya manusia terhadap petugas badan ad hoc pada Pemilu 2024 bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan dalam manajemen pemilu untuk meningkatkan kesejahteraan petugas. Pemilu 2024 menunjukkan penurunan jumlah kematian dan kecelakaan kerja di antara petugas dibandingkan dengan Pemilu 2019, tetapi masih terdapat kelemahan dalam sistem manajemen yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan diskusi, penyusunan laporan dan publikasi. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah dan KPU dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam pemilu.

Kata Kunci : Manajemen sumber daya manusia, Petugas badan ad hoc, Pemilu 2024, Kesejahteraan petugas

ABSTRACT

The discussion on human resource management for ad hoc election staff in the 2024 elections aims to evaluate and identify improvement steps in election management to enhance staff welfare. The 2024 elections show a decrease in the number of deaths and work-related accidents among staff compared to the 2019 elections, but there are still weaknesses in the management system that need addressing. This activity includes planning, conducting discussions, and preparing reports. The outcomes of this activity are expected to provide valuable discussion for the government and the General Election Commission (KPU) in formulating better and sustainable policies, as well as raising public awareness about the importance of human resource management in elections.

Keywords : Human resource management, Ad hoc election staff, 2024 Elections, Staff welfare

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu di Indonesia telah menunjukkan adanya kelemahan

dalam sistem manajemen pemilu, seperti yang terlihat dari kasus kematian dan kecelakaan kerja yang dialami oleh petugas badan ad hoc. Faktor-faktor yang

berkontribusi meliputi beban kerja yang berlebihan, kurangnya pelatihan yang memadai, serta ketidakcukupan fasilitas dan dukungan kesehatan bagi petugas. Tekanan politik dan administratif juga dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas manajemen pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petugas di lapangan. (Hutagalung & Rachmandani, 2023; Latief, 2022).

Pada Pemilu 2024, terdapat 181 petugas badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang meninggal dan 4.770 yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit, menunjukkan perbaikan namun masih ada kelemahan. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2019, jumlah petugas yang meninggal mencapai 894 dan yang sakit sebanyak 5.175. Meskipun sudah ada perbaikan kebijakan dari Pemilu 2019, masalah ini masih terjadi pada Pemilu 2024. (Sejati, 2024, Aditya & Ihsanudin, 2024)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh pemerintah, terutama KPU, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024.

2. PERMASALAHAN MITRA

Meskipun ada penurunan jumlah kematian dan kecelakaan kerja dibandingkan Pemilu 2019, masih terdapat kelemahan dalam sistem manajemen yang mengatur kesejahteraan dan keselamatan petugas badan *ad hoc*. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan langkah-langkah perbaikan yang optimal untuk memperbaiki manajemen sumber daya manusia dalam Pemilu 2024. Kebutuhan akan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dari pemerintah dan KPU untuk mendukung kesejahteraan dan keamanan petugas pemilu.

3. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa diskusi mengenai

manajemen sumber daya manusia terhadap petugas badan *ad hoc* pada Pemilu 2024. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen SDM dalam pemilu dan memastikan kesejahteraan petugas badan *ad hoc*. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- a) Perencanaan Kegiatan. Menentukan tujuan utama diskusi, yaitu membahas manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk petugas badan *ad hoc* pada Pemilu 2024, serta sasaran yang ingin dicapai seperti perbaikan sistem manajemen dan pengurangan risiko kesehatan petugas. Menyusun tim yang terdiri dari mahasiswa di bidang manajemen SDM, kesehatan kerja, dan pemilu. Menyiapkan materi diskusi yang meliputi masalah yang dihadapi, langkah-langkah pencegahan, dan solusi yang mungkin.
- b) Pelaksanaan Diskusi. Menentukan lokasi yang strategis dan waktu yang sesuai untuk pelaksanaan diskusi. Menunjuk seorang fasilitator yang akan memimpin diskusi dan memastikan bahwa semua topik dibahas dengan baik. Mengadakan diskusi dengan agenda yang mencakup: tujuan dan latar belakang diskusi, membahas masalah yang dihadapi petugas badan *ad hoc* selama Pemilu 2024, solusi potensial seperti pembatasan jam kerja, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dan teknologi.
- c) Penyusunan Laporan. Mencatat hasil diskusi secara rinci termasuk rekomendasi dan rencana aksi yang dihasilkan. Menyusun laporan hasil diskusi yang mencakup analisis masalah, solusi yang diusulkan, dan rencana aksi. Mempublikasikan laporan dan mendapatkan umpan balik lebih lanjut.
- d) Penutup. Mengadakan evaluasi akhir untuk menilai keberhasilan kegiatan pengabdian dan dampaknya terhadap manajemen pemilu. Menyusun rencana perbaikan untuk kegiatan

pengabdian di masa mendatang berdasarkan hasil evaluasi.

Penulisan paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen resmi terkait pemilu. (Abdussamad, 2021) Hasil kajian ini diharapkan memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan KPU dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perbaikan manajemen pemilu untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan adil di Indonesia.



Gambar 1. Pelaksana Kegiatan dari Mahasiswa

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

(Sejati, 2024)

Fungsi Pengawasan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI

Komisi II DPR RI berperan penting dalam pemerintahan Indonesia, menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, dan kepemiluan. Mereka terlibat dalam proses legislasi, penyusunan, dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait bidang tanggung jawab mereka. Selain itu, Komisi II juga menjalankan fungsi pengawasan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan kunjungan ke daerah-daerah untuk memantau kebijakan serta mendengar aspirasi masyarakat. Komisi ini juga dapat membentuk Pansus untuk menyelidiki masalah khusus. (Wikipedia)

Dengan tugas-tugas yang luas dan kompleks, Komisi II berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat dijalankan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya berpenting dalam mendorong KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan tahapan pemilu.

Peningkatan integritas dan kapasitas manajemen pemilu melalui perbaikan aspek administratif, manajemen waktu, dan pemenuhan anggaran serta fasilitas adalah kunci untuk mencegah terulangnya korban jiwa pada Pemilu 2024. Komisi II DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendorong KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan. Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan pemilu mendatang dapat berjalan dengan lebih lancar, aman, dan efisien, memberikan dampak positif yang signifikan bagi proses demokrasi di Indonesia.

Komisi II DPR RI memiliki peran penting dalam mendorong KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan tahapan pemilu. Beberapa

langkah yang bisa diambil oleh Komisi II DPR RI termasuk:

a) Evaluasi Tahapan Pemilu

Komisi II DPR RI harus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi terhadap tahapan pemilu, khususnya dari sisi manajemen waktu. Penetapan jadwal yang realistis dan memberikan waktu yang cukup untuk sosialisasi, pemenuhan persyaratan administratif, dan persiapan teknis oleh petugas badan ad hoc sangat penting untuk menghindari kelelahan dan tekanan yang berlebihan. Tahapan sosialisasi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami prosedur dan tanggung jawab mereka dengan jelas.

b) Pemenuhan Anggaran dan Fasilitas

Komisi II DPR RI perlu memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengevaluasi kembali anggaran pemenuhan fasilitas dan kebutuhan operasional di lapangan. Anggaran harus disesuaikan dengan standar kemahalan sesuai dengan wilayah masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyediaan fasilitas yang memadai dan perlengkapan operasional yang sesuai standar sangat penting untuk memastikan bahwa petugas dapat bekerja dengan efisien dan nyaman.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah komponen vital dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dioperasikan oleh KPPS yang terdiri dari tujuh anggota, termasuk seorang ketua yang merangkap sebagai anggota. Dalam kondisi tertentu, anggota keempat dan ketujuh KPPS dapat merangkap tugas sebagai penjaga ketertiban di TPS jika tidak ada petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada Pemilu 2024, jumlah anggota KPPS mencapai 5.741.127 orang.

Peran KPPS sangat krusial karena mereka bertanggung jawab memastikan bahwa hasil pemungutan suara dari masyarakat terekap dan dihitung dengan akurat. Selain itu, mereka harus menjaga ketertiban di TPS untuk mencegah kekacauan, mulai dari persiapan, pencoblosan, hingga perhitungan surat suara. Tugas ini menuntut KPPS bekerja secara intensif selama proses pemilu, yang dapat berlangsung dari pagi buta hingga larut malam. KPPS memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan kejujuran pemilu di Indonesia. (Maulana, 2024)

Terdapat penurunan signifikan dalam jumlah petugas yang gugur atau sakit pada Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2019, namun masih banyak yang perlu diperbaiki. Gugurnya petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan cepat. (Ningrum, 2024; Aditya & Ihsanudin, 2024).

Faktor-faktor utama penyebabnya adalah kelelahan akibat beban kerja yang berat dan penyakit penyerta. Upaya perbaikan harus difokuskan pada pengaturan jam kerja, pemeriksaan kesehatan, pelatihan yang memadai, rekrutmen yang selektif, dan penggunaan teknologi untuk meringankan beban kerja petugas. Dengan demikian, diharapkan keselamatan dan kesejahteraan petugas KPPS dapat lebih terjamin, sehingga penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan aman.

Petugas KPPS sering kali harus bekerja tanpa henti dari pagi buta hingga malam hari, bahkan hingga 24 jam nonstop terutama pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara. Kondisi ini menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang ekstrem, berdampak negatif pada kesehatan mereka. Pada Pemilu 2024, banyak petugas KPPS diketahui bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan

penghitungan suara dan administrasi yang diperlukan

Selain kelelahan, banyak petugas KPPS yang meninggal dunia juga memiliki penyakit penyerta (komorbid). Riset oleh Kementerian Kesehatan, Universitas Gajah Mada, dan Ikatan Dokter Indonesia menemukan bahwa penyakit komorbid seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan diabetes menjadi penyebab utama kematian petugas KPPS pada Pemilu 2019. KPU juga mengungkapkan bahwa sebagian besar petugas KPPS yang meninggal berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan yang buruk, ditambah dengan beban kerja yang berat, meningkatkan risiko kematian di kalangan petugas KPPS.

Pemerintah telah menetapkan batas usia untuk petugas KPPS antara 17 hingga 55 tahun untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat memiliki fisik yang cukup bugar untuk menghadapi beban kerja yang berat. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan tenaga kerja yang memenuhi syarat di beberapa daerah. Selain itu, skrining kesehatan menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan kondisi fisik petugas bebas dari penyakit bawaan yang dapat meningkatkan risiko kematian. Ini memerlukan prosedur yang lebih ketat dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap petugas dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugas dengan baik

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan bahwa kualitas dan keselamatan petugas badan ad hoc dapat lebih terjamin, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lebih lancar dan minim risiko. Perbaikan-perbaikan ini juga akan memberikan kontribusi positif bagi terciptanya pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis di Indonesia.



Gambar 2. Anggota KPPS yang bertugas pada Pemilu 2024

Langkah-langkah Pencegahan

(Sinambela, 2024)

Melalui langkah-langkah pencegahan yang komprehensif dan manajemen yang lebih baik, risiko kesehatan dan kelelahan di kalangan petugas KPPS dapat dikurangi, memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih aman dan efisien di masa mendatang. Komitmen untuk terus memperbaiki sistem dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan petugas KPPS adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa pada masa mendatang, beberapa langkah pencegahan perlu diambil:

- a) **Pembagian Tugas yang Jelas.** Membuat pembagian tugas yang jelas dan merata di antara petugas untuk menghindari beban kerja yang berlebihan pada individu tertentu. Menambah jumlah petugas dan relawan untuk membantu mengurangi beban kerja petugas badan ad hoc selama pemilu.
- b) **Pembatasan Jam Kerja.** Mengatur jadwal kerja yang lebih manusiawi bagi petugas KPPS, termasuk pembatasan jam kerja dan pemberian waktu istirahat yang cukup. Jadwal yang lebih teratur dan seimbang dapat membantu mengurangi kelelahan dan tekanan fisik yang berlebihan.
- c) **Pemeriksaan Kesehatan.** Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum penugasan untuk memastikan bahwa petugas yang bertugas tidak memiliki

penyakit komorbid yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.

- d) **Pelatihan dan Dukungan.** Memberikan pelatihan yang memadai mengenai manajemen stres dan kesehatan bagi petugas KPPS. Selain itu, menyediakan dukungan medis di lapangan untuk menangani kondisi darurat. Pelatihan ini dapat membantu petugas mengelola stres dan menjaga kesehatan selama pemilu.
- e) **Rekrutmen Berdasarkan Kesehatan.** Memprioritaskan rekrutmen petugas yang berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan berusia di bawah 50 tahun untuk mengurangi risiko kematian akibat kondisi kesehatan yang buruk. Rekrutmen yang lebih selektif dapat memastikan bahwa petugas yang ditugaskan memiliki kemampuan fisik yang memadai.
- f) **Teknologi dan Automasi.** Memanfaatkan teknologi untuk mengurangi beban kerja manual, seperti penggunaan sistem penghitungan suara yang lebih efisien dan otomatis. Teknologi ini dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia, sehingga meringankan beban kerja petugas KPPS.
- g) **Pengelolaan Stres dan Kesehatan Mental.** Menyediakan dukungan psikologis bagi petugas yang mengalami stres atau tekanan mental. Program ini dapat mencakup konseling dan layanan kesehatan mental yang tersedia selama dan setelah pemilu. Menyelenggarakan pelatihan manajemen stres untuk petugas guna membantu mereka mengelola tekanan kerja dengan lebih baik.

Ketaatan pada aspek administratif, seperti pemenuhan persyaratan usia, dan perbaikan manajemen pemilu dari sisi teknis di lapangan adalah dua hal yang sangat penting. Langkah-langkah

perbaikan yang perlu dilakukan pada aspek administratif:

- a) **Kepatuhan terhadap Persyaratan Usia**
Salah satu perbaikan yang diperlukan adalah memastikan kepatuhan terhadap persyaratan usia bagi petugas badan ad hoc. Hal ini penting untuk memastikan bahwa petugas yang direkrut memiliki stamina dan kemampuan fisik yang memadai untuk menjalankan tugas berat dalam jangka waktu yang panjang. Menambahkan verifikasi kesehatan sebagai bagian dari persyaratan administratif untuk memastikan bahwa petugas dalam kondisi fisik yang baik sebelum dan selama pemilu berlangsung.
- b) **Manajemen Pemilu di Lapangan**
Proses rekrutmen dan pelatihan petugas badan *ad hoc* harus lebih selektif dan intensif. Pelatihan yang memadai mengenai tugas-tugas teknis dan manajemen stres sangat penting untuk mempersiapkan petugas menghadapi tekanan kerja selama pemilu. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja petugas badan *ad hoc* harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan Perbaikan Manajemen Pemilu 2024

(Arlinta, 2024; Perdana, 2019)

Meskipun jumlah petugas KPPS yang gugur atau sakit pada Pemilu 2024 menurun secara signifikan dibandingkan Pemilu 2019, perbaikan tetap diperlukan. Fokus pada aspek administratif seperti pemenuhan persyaratan usia dan manajemen pemilu yang lebih baik di lapangan sangat penting. Rekrutmen yang lebih selektif, penggunaan teknologi, dan peningkatan kesejahteraan petugas adalah langkah-langkah kunci untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. KPU perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta praktik di lapangan untuk memastikan pemilu yang adil, aman, dan efisien di masa depan.

Langkah-langkah penting perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus kematian di kalangan petugas KPPS pada Pemilu 2024. Dengan pembatasan usia, skrining kesehatan, perbaikan honor dan jaminan sosial, pengurangan beban kerja melalui teknologi, rekrutmen generasi muda, persiapan bimbingan teknis yang baik, serta perhatian pada keselamatan dan kesehatan lingkungan, diharapkan bahwa penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lebih aman dan efektif. KPU harus terus berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini dengan konsisten untuk memastikan bahwa para petugas pemilu dapat menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan mereka. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

a) Pembatasan Usia dan Skrining Kesehatan

Banyaknya kasus kematian di kalangan anggota KPPS pada Pemilu 2019 mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan rekrutmen guna mencegah kejadian serupa pada Pemilu 2024. Salah satu kebijakan utama adalah pembatasan usia calon anggota KPPS antara 17 hingga 55 tahun. Sebelumnya, tidak ada batasan usia maksimal, yang memungkinkan rekrutmen petugas dengan kondisi kesehatan yang beragam dan kadang-kadang kurang memadai untuk tugas berat ini. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas yang direkrut memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk menjalankan tugas berat selama pemilu. Selain itu, dilakukan skrining kesehatan untuk memastikan kondisi fisik petugas bebas dari penyakit bawaan yang dapat meningkatkan risiko kematian. Skrining ini penting untuk mengidentifikasi dan mengecualikan calon petugas dengan kondisi kesehatan yang dapat membahayakan mereka selama menjalankan tugas pemilu.

b) Perbaikan Honor dan Jaminan Sosial

Perbaikan honor bagi petugas pemilu juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras mereka. Pada Pemilu 2024, ketua KPPS mendapatkan honor sebesar Rp 1,2 juta, sementara anggota mendapatkan Rp 1,1 juta. Perbaikan honor ini diharapkan dapat memberikan insentif tambahan bagi petugas, meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas. Pemerintah juga telah memperbaiki jaminan sosial melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Penyelenggara pemilu termasuk dalam kategori tenaga kerja yang dijamin oleh program ini. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko kerja, termasuk kecelakaan dan kematian, yang memberikan rasa aman bagi petugas selama bertugas.

c) Pengurangan Beban Kerja dan Pemanfaatan Teknologi

Untuk mengurangi beban kerja yang berat, KPU telah mengalokasikan anggaran untuk fotokopi salinan C hasil, yang sebelumnya harus ditulis tangan oleh petugas KPPS untuk sekitar 34 salinan. Pengurangan tugas manual ini diharapkan dapat meringankan beban kerja petugas KPPS dan mengurangi risiko kelelahan. Selain itu, KPU telah memperkenalkan Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) 2024 sebagai alat bantu untuk pencatatan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara di TPS. Meskipun sistem ini masih mengalami banyak kendala dalam praktiknya, penggunaan teknologi ini merupakan langkah penting menuju efisiensi dan akurasi yang lebih baik dalam penghitungan suara.

d) Fokus pada Rekrutmen Generasi Muda Data menunjukkan bahwa sekitar 30% petugas yang meninggal pada Pemilu 2024 berusia antara 51-60 tahun. Oleh karena itu, KPU perlu lebih ketat dalam menerapkan persyaratan usia untuk petugas badan ad hoc dan mendorong partisipasi generasi muda, seperti

mahasiswa. Generasi muda umumnya memiliki fisik yang lebih bugar dan risiko kesehatan yang lebih rendah. KPU dapat melakukan sosialisasi di kampus-kampus dan mendorong kampus untuk memberikan bobot nilai tersendiri bagi mahasiswa yang bersedia menjadi anggota KPPS. Langkah ini tidak hanya membantu dalam rekrutmen petugas yang lebih sehat, tetapi juga merupakan wujud keteladanan politik generasi muda dalam semangat demokrasi.

e) Persiapan Bimbingan Teknis dan Pembangunan TPS

KPU perlu melakukan pelantikan penyelenggara ad hoc lebih awal dan memberikan bimbingan teknis secara bertahap agar pemahaman petugas KPPS tidak minim. Bimbingan teknis yang dilakukan lebih awal dapat membantu petugas KPPS memahami tugas mereka dengan lebih baik dan mengurangi kesalahan operasional di lapangan. Pembangunan TPS juga perlu dilakukan lebih cepat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan menyediakan anggaran yang cukup. Anggaran ini harus mempertimbangkan standar waktu sewa di lokasi setempat dan menjamin bahwa TPS dibangun dengan cukup kokoh untuk menghadapi cuaca ekstrem. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPS juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu yang tertib dan aman.

f) Aspek Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan

Anggaran juga harus mencakup aspek keselamatan dan kesehatan lingkungan di sekitar TPS. Ini termasuk memastikan bahwa TPS tetap bersih dan sehat dengan membayar petugas kebersihan secara tersendiri dan menyediakan anggaran konsumsi yang cukup untuk membelanjakan makanan sehat. Penyediaan makanan sehat dan vitamin bagi petugas penting untuk menjaga stamina mereka selama bertugas. Dengan anggaran yang cukup, KPU dapat memastikan bahwa lingkungan TPS

mendukung kesehatan petugas dan pemilih. Kebersihan dan kesehatan lingkungan juga berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan pemilu.

Perlunya melibatkan generasi muda, seperti mahasiswa, sebagai penyelenggara pemilu dapat memberikan energi dan semangat baru dalam proses pemilu. Untuk mencapai ini, pemerintah dan KPU dapat melakukan beberapa langkah, antara lain:

- KPU harus aktif melakukan sosialisasi di kampus-kampus untuk menarik minat mahasiswa. Kampanye ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan kolaborasi dengan organisasi mahasiswa.

- Kampus-kampus dapat memberikan insentif akademik seperti kredit atau nilai tambahan bagi mahasiswa yang berpartisipasi sebagai petugas pemilu. Ini akan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk terlibat dalam proses pemilu.

- Menyebarkan testimoni dari mahasiswa yang pernah menjadi petugas pemilu dapat menjadi cara efektif untuk menarik minat. Pengalaman positif mereka bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

5. KESIMPULAN

Diskusi mengenai manajemen sumber daya manusia bagi petugas badan ad hoc Pemilu 2024 mengevaluasi dan mengidentifikasi langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas. Meskipun jumlah kematian dan kecelakaan kerja menurun dibandingkan Pemilu 2019, kelemahan dalam sistem manajemen masih perlu diperbaiki. Diskusi ini membahas perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan publikasi, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya manajemen SDM dalam pemilu.

Rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi ini meliputi pembagian tugas yang jelas, pembatasan jam kerja, pemeriksaan kesehatan, pelatihan dan

dukungan bagi petugas, rekrutmen berdasarkan kesehatan, serta penggunaan teknologi dan automasi untuk meringankan beban kerja petugas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan petugas pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lebih aman, efisien, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

References

- Abdussamad H.Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press, Makassar
- Aditya, N.R., Ihsanudin. (2024). KPU ungkap 181 petugas pemilu meninggal pada 14-25 Februari. *kompas.com*. Diambil dari: <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/13462131/kpu-ungkap-181-petugas-pemilu-meninggal-pada-14-25-februari>
- Arlinta D. (2024). Agar Tak Ada Lagi Kasus Kesakitan dan Kematian Petugas KPPS. Diambil dari: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/13/pemantauan-kesehatan-diperkuat-cegah-kesakitan-dan-kematian-petugas-kpps>
- Hutagalung G.F., Rachmandani RA. (2023). Jaminan Sosial: Suatu Upaya Non-Mitigasi Beban Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.5 No.1.
- Latief M.I. (2022). Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.10, No.1.
- Maulana F. (2024). Ini Beda PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilu. Diambil dari: https://umj.ac.id/just_info/apa-beda-ppk-pps-dan-kpps-dalam-pemilu/
- Ningrum, M.K. (2024). Kisah kelam gugurnya 894 petugas KPPS di pemilu 2019, apa saja masalah yang mereka alami saat ini? *tempo.co*. Diambil dari: <https://nasional.tempo.co/read/1829787/kisah-kelam-gugurnya-894-petugas-kpps-di-pemilu-2019-apa-saja-masalah-yang-mereka-alami-saat-ini>.
- Perdana, Aditya. (2019). *Perihal para Penyelenggara Pemilu. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. BAWASLU, Jakarta.
- Sejati S.B. (2024). Evaluasi Manajemen Pemilu 2024 terhadap Gugurnya Petugas Badan Ad Hoc. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan. *Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Vol. XVI, No. 7/1/Pusaka.
- Sinambela, N.M. (2024). KPU siapkan inovasi kebijakan cegah petugas KPPS meninggal dunia. *antaranews.com*. Diambil dari: <https://www.antaranews.com/berita/3940095/kpu-siapkan-inovasi-kebijakan-cegah-petugas-kpps-menin>
- Wikipedia. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*.